

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM DAN SANKSI BAGI PELAKU KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 angka 8, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹ Yang dimaksud “mengadili” adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.² Di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³

¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, (Bogor: Politea, 1997), 9.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 80.

³ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam suatu putusan di atur dalam KUHAP

Pasal 197 huruf d yang berbunyi:⁴

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” di sini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.⁵ Bentuk-bentuk pertimbangan Hakim yaitu:⁶

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapaun pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jika dalam tuntutan perdata disebut gugatan, maka dalam perkara pidana disebut dengan dakwaan. Dakwaan merupakan

⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang...*, 174.

⁵ Ibid., 175.

⁶ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus, 2015), 347.

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Hakikatnya, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi Hakim di dalam sidang pengadilan.⁸

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) yaitu:

3) Keterangan Saksi

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu

⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang....*, 167.

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri”.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 yaitu:

“salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.¹⁰

4) Barang Bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada Hakim, Hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Adanya barang bukti dalam persidangan akan menambah keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara.¹¹

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim.

¹⁰ Ibid., 6.

¹¹ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim..., 351.

b) Pertimbangan Non Yuridis

1) Latar Belakang Pembuatan Terdakwa

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti menimbulkan korban ataupun kerugian pada pihak

¹³ Ibid., 352.

lain. Akibat yang demikian ini juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

3) Kondisi Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah karena mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain.

3. Faktor-Faktor yang Diperhatikan

Jika Hakim menjatuhkan pidana, harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Praktik sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain, memberi keterangan yang berbelit-belit, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.¹⁴

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan...*, 89.

- 1) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana;
- 2) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana;
- 3) Seseorang yang dengan suka rela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- 4) Wanita hamil melakukan tindak pidana;
- 5) Seseorang yang dengan sukarela memberi ganti kerugian layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 6) Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa;
- 7) Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

1) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana

[illegible]

4. Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah Hakim yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut:¹⁶

- a) Putusan Bebas, adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat 1 KUHAP);
- b) Putusan Lepas, adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat 2 KUHAP);
- c) Putusan Pemidanaan, adalah jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 KUHAP).

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 347.

1. Pengertian Kelalaian

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sedemikian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati atau yang teledor. Dengan pendek: yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu”.

[illegible]

D. Simon menerangkan kelalaian (kealpaan) sebagai berikut:¹⁸

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu: Tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan –keadaan itu tidak ada”.

2. Unsur-Unsur Kelalaian

Mengenai unsur-unsur kelalaian, H.B. Vos mengatakan bahwa kelalaian (kealpaan) itu mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu:¹⁹

- a. Terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 25.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 15.

- b. Ketidakhati-hatian perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.

Menurut H.B. Vos selanjutnya, “dapat melihat ke depan suatu akibat” merupakan syarat subyektif (pembuat harus dapat melihat ke depan), misalnya seorang anak kecil yang memindahkan wisel rel kereta api sehingga kereta api keluar rel, tidaklah bersalah (*culpa*) jika ia tidak tahu apakah wisel rel kereta api itu. Tetapi kelalaian itu ada ada pula segi obyektifnya, yaitu sesudah dilakukan perbuatan, dikatakan pembuat dapat melihat ke depan akibatnya jika seharusnya ia telah perkirakan.

3. Bentuk-bentuk Kelalaian (kealpaan)

Kealpaan dibedakan atas:²⁰

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.

- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste sschuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 172.

Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) misalnya, mengadakan pesta di dalam ruangan yang banyak menggunakan penerangan (lilin) di dekat tirai yang mudah terbakar. Meskipun untuk keamanan telah disiapkan alat pemadam api, apabila kebakaran yang tidak dikehendaki itu terjadi merupakan kealpaan yang disadari, karena orang tersebut insyaf akan adanya bahaya. Kealpaan yang tidak disadari adalah melempar barang di luar gedung tanpa memikirkan kemungkinan bahwa orang lain akan lewat di situ, maka kecelakaan itu terjadi. Kealpaannya karena kurang untuk berikhtiar terhadap peristiwa yang tidak terduga yang seharusnya diingat kemungkinan itu.

Di Indonesia pengaturan

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) dan (4) yang dimaksud luka ringan dan luka berat adalah:²²

Ayat 3: Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan

²² Ibid.

perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.

Ayat 4: Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

C. Kelalaian dalam Hukum Pidana Islam

Kelalaian yang menyebabkan luka berat dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam tindak pidana atas selain jiwa. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.²³ Abdul Qadir Audah memberikan pengertian tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa

²³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunnah*, ter. Abu Ihsan, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 319.

1. Pembagian tindak pidana atas selain jiwa

a. Ditinjau dari segi niatnya

1) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja

فَالْعَمْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 179.

²⁵ Ibid., 180.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, 77.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 180.

Perbuatan sengaja terdiri dari (dua) unsur, yaitu unsur moral (*immaterial*) yang berupa niatan, dan unsur material yaitu berupa perbuatan yang membentuk *jārimah*.²⁹

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan, adalah:³⁰

“Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetap tidak ada maksud hukum”.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 286

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam....*, 180.

[illegible]

g) *Muwaddihah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada *samhaq*.

Tulang korban mengalami keretakan kecil.

h) *Hāshimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.

i) *Munqilah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempat semula.

j) *‘Ammah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.

k) *Dāmighah*, yaitu luka yang merobek tempurung otak dan mencapai otak.

4) *Al-Jirah*

Al-jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *aṭraf*. Anggota badan yang termasuk dalam golongan *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.³⁶ *Al-jirah* terdiri atas dua macam, yaitu:³⁷

a. *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai menembus dalam dari perut dan dada.

b. *Ghayr jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai bagian dalam dari dada dan perut, tetapi hanya bagian luarnya saja.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 183.

³⁷ M. Nurul Irfan dan Msyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 13.

a. Hukuman untuk *'ibahah* (perusakan) *aṭraf* dan Sejenisnya

Aṭraf menurut para fukaha adalah tangan dan kaki. Pengertian tersebut kemudian diperluas kepada anggota badan yang lain sejenis *aṭraf*, yaitu jari, bulu mata, gigi, rambut, jenggot, alis, lidah, zakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Sedangkan tindakan perusakan *aṭraf* dan sejenisnya meliputi tindakan pemotongan, seperti pada tangan dan kaki, pencongkelan seperti pada mata, dan pencabutan seperti pada gigi, serta tindakan lain yang sesuai dengan jenis anggota badannya. Hukuman pokok untuk perusakan *aṭraf* dengan sengaja adalah kisas, sedangkan hukuman penggantinya adalah diat.⁴¹

⁴¹ Ibid., 185.

Hukuman diat baik sebagai hukuman pokok atau hukuman pengganti, digunakan pengertian untuk diat yang penuh (*kāmilah*), yaitu 100 (seratus ekor unta). Adapun untuk hukuman yang kurang dari diat yang penuh maka digunakan istilah *irsh* (إِرْشٌ). *Irsh* sendiri ada dua macam yaitu:⁴³

⁴³ Ibid., 195.

- Hukuman diat *kāmīlah* berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya, seperti hilangnya kedua tangan. Sedangkan *irsh* berlaku apabila manfaat jenis anggota badan itu hilang sebagian, sedangkan sebagian lainnya masih utuh. Contoh seperti hilangnya satu (sebelah) tangan, satu kaki, atau satu jari.

[illegible]

Di bawah ini dijelaskan secara rinci diat *kāmilah* dan *ghayr kāmilah* untuk masing-masing anggota badan, yaitu:

Diat yang sempurna untuk hidung berlaku apabila bagian yang rusak adalah tulang rawan.⁴⁵ Rasulullah saw. bersabda:⁴⁶

“Pemotongan hidung apabila sampai habis, maka wajib diat”.

⁴⁶ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 40.

Menurut mazhab Syafi'i berlaku hukuman diat atas tindak pidana yang mengakibatkan kulit rusak atau terkelupas seluruhnya, karena pada umumnya seseorang jarang yang dapat bertahan hidup dalam kondisi tubuh tanpa kulit. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal, pada perusakan kulit tidak berlaku hukuman diat, melainkan *hukumah*.⁵⁵

7) Diat Rambut, Jenggot dan Alis

⁵⁴ Ibid., 201.

[illegible]

menambah keindahan dan kecantikannya. Sedangkan untuk rambut (bulu) yang lain, seperti alis dan kumis hanya berlaku *ḥukumah*.⁵⁶

8) Diat Tangan

Dalam menghilangkan kedua tangan berlaku hukum diat.

Rasulullah Saw bersabda:⁵⁷

... فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ

“... Di dalam perusakan kedua tangan berlaku hukuman diat”

Apabila salah satu tangan yang hilang, rusak atau potong, hukumannya adalah separuh diat, berdasarkan surat dari Nabi Muhammad kepada Amr ibn Hazm ketika ia ditugaskan ke Najran yang isinya antara lain:⁵⁸

... فِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

“... Dalam perusakan tangan satu tangan dikenakan hukuman lima puluh ekor unta”

Pemotongan jari dikenakan hukuman sepersepuluh diat, yaitu sepuluh ekor unta untuk satu jari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:⁵⁹

دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أَصْبَعٍ

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 39.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 201.

⁵⁹ Salch al-Fauzan, *Fiqh Shari-hari...*, 808.

Untuk pemotongan tangan atau jari yang lumpuh, hanya berlaku *hukumah*. Alasannya dalam kasus ini yang dirusak hanya keindahannya saja sedangkan manfaatnya memang sejak awal sudah tidak ada. Dan disetiap ruas jari tangan diatnya sepertiga dari sepersepuluh diat. Sebab, di setiap jari ada tiga ruas. Maka, diat-nya dibagi sesuai dengan jumlahnya, sebagaimana pembagian diat pada jari-jari. Akan tetapi, bagi ibu jari yang hanya terdiri dari dua ruas saja, maka diat-nya dibagi dua yaitu lima ekor unta.⁶⁰

Pemotongan kaki wajib berlaku diat penuh (seratus ekor unta), Rasulullah Saw bersabda:⁶¹

وَفِي الرَّجُلَيْنِ الذَّيْنِ

Perusakan atau pemotongan kedua kaki dikenakan hukuman diat *kāmilah*, sedangkan untuk satu kaki adalah separuh diat. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu

⁶¹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 39.

Dawud, Nasa'i, dari Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:⁶²

... وَفِي الرَّجُلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ...

“... Pada pemotongan satu kaki berlaku separuh diat...”

Pemotongan jari kaki hukumnya sama dengan pemotongan jari tangan, yaitu sepersepuluh diat untuk satu jari, yaitu sepuluh ekor unta. Demikian pula pemotongan bagian jari-jari kaki, hukumannya sama dengan pemotongan bagian jari-jari tangan.⁶³

10) Diat Mata

Hukuman diat untuk merusakkan kedua mata adalah seratus ekor unta, sedangkan untuk merusakkan sebelah mata diatnya adalah lima puluh ekor unta. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari Amr ibn Hazm, yang di dalamnya disebutkan:⁶⁴

... وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ ...

"... Pada perusakan kedua mata berlaku hukuman diat..."

Untuk mata yang buta sebelah, sedangkan sebelahnya masih normal, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, untuk

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 203.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

keduanya berlaku separuh diat, karena mata yang sebelah tidak berfungsi.

11) Diat Telinga

Perusakan atau pemotongan kedua telinga dikenakan hukuman diat yang sempurna, yaitu seratus ekor unta, sedangkan perusakan salah satunya dikenakan separuh diat atau lima puluh ekor unta. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:⁶⁵

... وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ...

“... Pada perusakan satu telinga berlaku hukuman diat lima puluh ekor unta...”

Manfaat daun telinga adalah menghimpun suara untuk diteruskan ke dalam lubang telinga.⁶⁶ Apabila pemotongan kedua telinga tidak mengakibatkan hilangnya daya pendengaran maka menurut jumhur ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian fuqaha Malikiyah, pelaku tetap dikenakan hukuman diat.⁶⁷

⁶⁵ Ibid., 204.

⁶⁶ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 41.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 203.

12) Diat Bibir

Perusakan kedua bibir dikenakan diat sempurna, yaitu seratus ekor unta. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:⁶⁸

... وَفِي الشَّقَقَيْنِ الدِّيَّةُ ...

“... dan pada perusakan bibir berlaku diat...”

Pemotongan satu bibir baik sebelah atas maupun sebelah bawah dikenakan sparuh diat, yaitu lima puluh ekor unta.⁶⁹

13) Diat Puting Susu dan Buah Dada

Pemotongan buah dada dikenakan hukum diat yang sempurna dan pada salah satunya dikenakan separuh diat. Di samping itu, juga berlaku hukuman diat untuk pemotongan kedua puting susu. Dalam pemotongan kedua puting susu ini, Imam Malik mensyaratkan terhentinya air susu untuk bisa berlakunya hukum diat. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka untuk itu berlaku *ḥukumah*.⁷⁰

Perusakan buah dada laki-laki menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i hanya dikenakan *ḥukumah*. sedangkan menurut mazhab Hanbali, tetap berlaku hukuman diat.

⁶⁸ Ibid., 205.

⁶⁹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār*..., 41.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 205.

14) Diat Biji Pelir (telur Laki-Laki)

Perusakan dua buah biji pelir dikenakan hukuman diat yang sempurna. Hal ini didasarkan kepada hadis nabi dari Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:⁷¹

... وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ ...

“... Dan pada perusakan dua telur laki-laki berlaku hukuman diat...”

15) Diat Bibir Kelamin Perempuan

Dalam pemotongan dua bibir kemaluan perempuan berlaku hukuman diat yang sempurna apabila pemotongan tersebut sampai mengakibatkan kelihatan tulangnya. Pemotongan salah satunya dikenakan hukuman separuh diat, alasannya adalah karena pada kedua bibir kemaluan tersebut terdapat manfaat yang tidak ada duanya.⁷²

16) Diat Pinggul

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hukuman diat berlaku pada kerusakan dua buah pinggul, dan pada perusakan salah satunya berlaku separuh diat. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah, pada perusakan dua buah pinggul hanya

⁷¹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 46.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 205.

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam perusakan dua rahang berlaku hukuman diat yang sempurna dan pada perusakan salah satunya berlaku separuh diat. Apabila gigi turut rontok akibat perusakan rahang tersebut maka hukumannya ditambah dengan diat gigi. Akan tetapi menurut Imam Malik, perusakan rahang tidak mewajibkan diat yang sempurna, melainkan disamakan dengan hukuman untuk *Muwaddihah* muka.⁷⁴

18) Diat Kelopak Mata

⁷⁵ Ibid.

20) Diat Gigi

Hukuman diat yang berlaku untuk perusakan atau pencabutan setiap gigi adalah lima ekor unta. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi melalui Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:⁷⁷

... وَفِي السَّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ...

⁷⁶ Ibid., 207.

⁷⁷ Ibid., 207.

58

... وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الشَّيْءُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ^{١٨}

“... Dan diat gigi juga sama. Gigi depan dan geraham juga sama”

Apabila satu tindak pidana merontokkan gigi seluruhnya, yaitu tiga puluh dua gigi, menurut jumhur ulama yang terdiri dari Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, diat-nya adalah 160 (seratus enam puluh) ekor unta. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa diat satu buah gigi adalah lima ekor unta. Di kalangan mazhab Syafi'i dalam kasus ini berkembang dua pendapat. Pendapat pertama, yaitu pendapat yang sama dengan pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua, dalam kasus ini berlaku satu diat yang sempurna, yaitu seratus ekor unta, karena gigi merupakan jenis anggota badan yang terdiri atas beberapa buah, seperti halnya jari. Oleh karena gigi secara keseluruhan merupakan satu paket maka diatnya tidak boleh lebih dari seratus ekor unta.⁷⁸

b. Hukuman untuk Menghilangkan Manfaat Anggota Badan

Menghilangkan manfaat anggota badan tidak berarti menghilangkan jenis anggota badan itu sendiri. Artinya, dalam hal ini hilang hanya

⁷⁸ Ibid.

Meskipun faktor kesulitan untuk melaksanakan hukuman kisas dalam tindak pidana menghilangkan manfaat ini sangat besar, namun menurut jumhur fuqaha selama hal itu memungkinkan tetap di upayakan untuk melaksanakannya. Apabila kisas tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka perlu dibebani hukuman diat.⁸⁰

Mengenai diat terhadap fungsi anggota tubuh yang dimaksud disini adalah fungsi semua anggota tubuh sebagaimana seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, indra untuk dan berjalan, yang disetiap anggota tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di setiap indra tersebut jika hilang atau lenyap fungsinya, maka diatnya adalah diat penuh yaitu 100 ekor unta. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab ketika menghukumi seorang laki-laki yang memukul laki-laki lain hingga hilang pendengarannya, penglihatannya,

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 209.

- a. Hilangnya akal, dikenakan diat penuh.
- b. Hilangnya pendengaran, dikenakan diat penuh.
- c. Hilangnya daya penglihatan, dikenakan diat penuh jika kedua mata, setengah diat jika satu mata.
- d. Hilangnya daya penciuman, dikenakan diat penuh.
- e. Hilangnya kemampuan berbicara, dikenakan diat penuh.
- f. Hilangnya daya perasaan oleh lidah, dikenakan diat penuh.
- g. Hilangnya kemampuan perempuan untuk berketurunan, dikenakan diat penuh.
- h. Hilangnya kemampuan bersetubuh, dikenakan diat penuh.
- i. Hilangnya daya gerak tangan sehingga lumpuh, dikenakan diat penuh.
- j. Hilangnya kemampuan berjalan, dikenakan diat penuh.

⁸² Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qisas di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 61.

c. Hukuman untuk *Shajāj*

Shajāj (الشَّجَاجُ) adalah jamak dari kata شَجَّةٌ, yaitu luka pada wajah dan kepala.⁸³ Hukuman untuk *shajāj* yaitu:

a) Hukuman Kisas

Dari macam-macam *shajāj*, hanya satu jenis yang disepakati oleh para fuqaha untuk dikenakan kisas, yaitu *muwaḍḍiḥah*. Sedangkan jenis-jenis *ash-Shajāj* di atas *muwaḍḍiḥah*, yaitu *hāshimah*, *munqilah*, *‘ammah*, dan *dāmighah* para fuqaha sepakat tidak berlaku kisas karena sangat sulit untuk dilaksanakan secara tepat tanpa ada kelebihan. Pendapat lain yaitu dari Mazhab Syafi’i dan Hanbali, tidak ada hukuman kisas pada *shajāj* sebelum *muwaḍḍiḥah*, karena luka-luka tersebut tidak sampai kepada tulang sehingga tidak ada batas pasti yang aman dari kelebihan.⁸⁴

b) Hukuman Diat

Hukuman diat yang diberlakukan untuk *shajāj* adalah diat *ghayr kāmilah* atau yang disebut dengan *irsh*. Untuk *shajāj* di bawah *muwaḍḍiḥah*, para ulama telah sepakat bahwa dalam kasus ini tidak ada *irsh muqaddar* (ganti rugi tertentu). Dengan demikian, untuk *shajāj* sebelum (di bawah) *muwaḍḍiḥah* hanya berlaku *ḥukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Riwayat dari

⁸³ Saleh Fauzan, *Fiqih Shari-hari...*, 810.

⁸⁴ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 213.

Imam Ahmad, bahwa untuk *dāmiyah* dikenakan satu ekor unta, *bādi'ah* dua ekor unta, *mutalāhimah* tiga ekor unta, dan *samḥāq* empat ekor unta. Dasarnya adalah bahwa Zaid ibn Tsabit pernah memutuskan hal itu.⁸⁵

Untuk tindak pidana *shajāj* mulai dari *muwaḍḍiḥah* dan sesudahnya berlaku *irsh muqaddar* (ganti rugi tertentu). Untuk *muwaḍḍiḥah* ganti ruginya adalah lima ekor unta, berdasarkan hadis Amr ibn Hazm yang disebutkan:

... وَفِي الْمَوْضِعَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ...

“... Dan di dalam luka *Muwaḍḍiḥah* hukumannya adalah lima ekor unta”

Pendapat ini juga didasarkan kepada hadis dari Amr ibn Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda:

فِي الْمَوَاضِعِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (رواه احمد)

“Di dalam luka-luka *muwaḍḍiḥah* berlaku lima ekor unta” (Hadis Riwayat Imam Ahmad).

Untuk luka *hasyimah*, yaitu luka yang memotong tulang, dikenakan ganti rugi sepuluh ekor unta. *Hāshimah* ini hanya dikenal oleh Imam Abu hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

⁸⁵ Ibid., 214.

... وَفِي الْمُنْقِلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ

Untuk luka *'ammah*, yaitu luka yang sampai kepada selaput otak, ganti ruginya adalah sepertiga diat. Dasarnya adalah hadis Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:

... وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ...

Untuk luka *dāmighah*, yaitu luka yang sampai menembus ke bagian otak, ganti ruinya adalah sepertiga diat. Menurut fuqaha mazhab syafi'i dan Hanbali, untuk luka *'ammah* dan *dāmighah* dikenakan sepertiga diat untuk *'ammah*, sedangkan kelebihannya dikenakan *hukumah*.⁸⁶

[illegible]

